

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

FATHANIL IZZATI
NPM : 1902110048



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FATHANIL IZZATI
NPM : 1902110048

Dengan judul:

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PADA KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2019-2021**

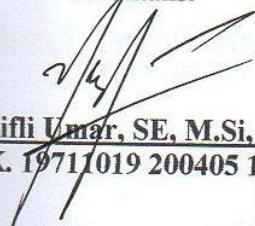
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

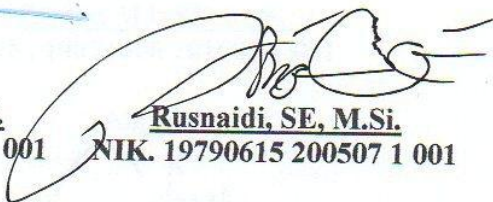
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II

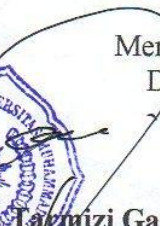

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001


Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001


Rusnaidi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan,




Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

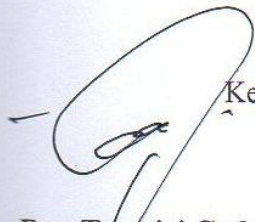
FATHANIL IZZATI
NPM : 1902110048

Dengan judul:

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PADA KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2019-2021**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 15 Februari 2023

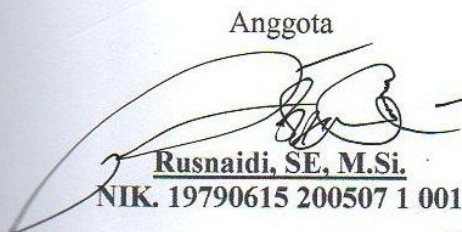
Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian


Ketua

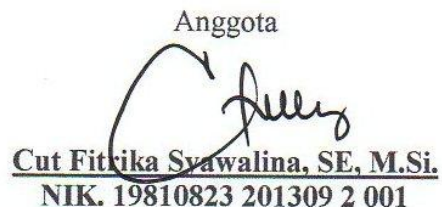
Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001


Sekretaris

Ermad MJ, SE, M.Si.
NIK. 19871606 201608 1 001


Anggota

Rusnaidi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001


Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si.
NIK. 19810823 201309 2 001



Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkaidi Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 20 Februari 2023
Yang Menyatakan



FATHANIL IZZATI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fathanil Izzati

NPM : 1902110048

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PADA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2021

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 20 Februari 2023

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Yang Menyatakan



FATHANIL IZZATI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2021**”. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Bapak Ermad. MI, SE, M.Si selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Rusnaldi, SE, M.Si selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.2 <i>Value For Money</i>	10
2.1.3 Kinerja	12
2.1.4 Anggaran	13
2.1.5 Kinerja Keuangan.....	15
2.1.6 Rasio Ekonomi	16
2.1.7 Rasio Efisiensi	18
2.1.8 Rasio Efektivitas.....	20
2.2 Penelitian Sebelumnya	22
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.1.1. Lokasi dan Objek Penelitian	29
3.1.2. Jenis Penelitian.....	29
3.1.3. Tingkat Intervensi Peneliti	30
3.1.4. Horizon Waktu	30
3.1.5. Unit Analisis.....	31
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.3 Definisi dan Operasional Variabel	32
3.4 Teknik Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
4.1.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya....	37
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya	39

4.2. Hasil Penelitian.....	39
4.2.1 Rasio Ekonomi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya	39
4.2.2 Rasio Efisiensi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya	41
4.2.3 Rasio Efektivitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya	43
4.3. Pembahasan	36
4.3.1 Analisis dan Pembahasan Rasio Ekonomi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya	44
4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya	46
4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efektivitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya	48
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi.....	17
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi	19
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	21
Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	31
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi.....	33
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi	34
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	35
Tabel 4.1 Hasil Rasio Ekonomi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 s.d 2021	33
Tabel 4.2 Hasil Rasio Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 s.d 2021.....	42
Tabel 4.3 Hasil Rasio Efektivitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 s.d 2021.....	43
Tabel 4.4 Target anggaran belanja dan Realisasi Anggaran belanja Anggaran Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 s.d 2021	44
Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Dari Tahun 2019 s.d 2021	46
Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 s.d 2021	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2021**

**FATHANIL IZZATI
NPM : 1902110048**

Pembimbing : 1. Ermad MJ, SE, M.Si
2. Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya yang ditinjau dari rasio ekonomi, efisiensi dan rasio efektivitas tahun 2019-2021. Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif yang difokuskan rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rasio ekonomi bahwa realisasi target anggaran belanja dan belanja target anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2021 dapat dikatakan ekonomis. Berdasarkan rasio efisiensi bahwa realisasi pengeluaran dan realisasi anggaran pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2021 dapat dikatakan tidak efisien. Berdasarkan rasio efektivitas bahwa realisasi anggaran pendapatan belanja dan anggaran pendapatan belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 dapat dikelola dengan efektif. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada dapat dikatakan tidak efektif.

Kata Kunci : *Pendapatan, Belanja Anggaran, Rasio Ekonomi, Efektivitas dan Efisiensi*

*VALUE FOR MONEY ANALYSIS IN MEASUREMENT OF FINANCIAL
PERFORMANCE AT THE ENVIRONMENTAL SERVICE
PIDIE JAYA DISTRICT 2019-2021*

FATHANIL IZZATI
NPM : 1902110048

Advisor I : Ermad MJ, SE, M.Si
II : Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze value for money in measuring financial performance at the Pidie Jaya Regency Environmental Service in terms of efficiency ratios and effectiveness ratios for 2019-2021. The analysis model that will be used is a descriptive analysis method that focuses on knowing the economic ratios, efficiency and effectiveness of spending at the Pidie Jaya Regency Environmental Service in 2019-2021. The results of the study show that based on economic ratios, the realization of the budget target and spending target budget at the Pidie Jaya Regency Environmental Service for 2019-2021 can be said to be economical. Based on the efficiency ratio, the realization of expenditure and realization of the revenue budget at the Pidie Jaya District Environmental Service for 2019-2021 can be said to be inefficient. Based on the effectiveness ratio, the realization of the expenditure revenue budget and expenditure revenue budget at the 2019 Pidie Jaya Regency Environmental Service can be managed effectively. Then in 2020 and 2021 it can be said to be ineffective.

Keywords: Income, Budget Spending, Economic Ratios, Effectiveness and Efficiency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Strategi pembangunan di era globalisasi menuntut format birokrasi yang berorientasi pada pendekatan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Faktor aparatur, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan begitu menentukan berhasil tidaknya suatu tugas pemerintahan mencapai tujuannya. Dalam upaya pembangunan sumber daya aparatur, bila ditinjau dari perspektif ilmu manajemen sumber daya manusia, maka administrasi negara berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berorientasi pada cara kerja yang profesional, efektif, efisien, dan tanggap terhadap dinamika proses perubahan lingkungan sehingga berdampak pada suatu organisasi atau instansi pemerintah.

Kinerja keuangan pemerintah merupakan pedoman dan cerminan dari sukses atau gagalnya pemerintah dalam memaksimalkan APBD yang diberikan pemerintah pusat untuk menjadikan daerah berada dalam tingkat kemandirian yang lebih baik. Mewujudkan *good government* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional (Zenita, 2022).

Menanggapi paradigma tersebut, pemerintah otonomi kepada seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efesiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam artian mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja keuangan instansi pemerintah diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan banyak dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja yang kadang berbeda. Untuk menilai seberapa jauh efektivitas operasi instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya diperlukan metode pengukuran tertentu. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu instansi pemerintah dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam mengambil keputusan. Untuk menganalisis Laporan Keuangan, maka salah satu metode pengukuran kinerja keuangan suatu instansi pemerintah adalah analisis rasio keuangan (Rasyidi, 2019).

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui metode *value for money*, selain penilaian finansial, terdapat pula penilaian kinerja yang bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten, yakni memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran. *Value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya yang ditinjau dari rasio ekonomi efisiensi dan rasio efektivitas

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. *Value for money* merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari input, output, dan outcome. *Value for money* menghendaki organisasi bisa memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas tersebut secara bersama-sama.

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena di satu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Atau di lain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan. Akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program yang dijalankan

dapat dikatakan *cost-effectiveness*. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan dapat memberikan ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor publik diidentikkan dengan pelayanan publik (Munandar, 2021). Untuk mengetahui tingkat penggunaan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)
2019	2.957.385.919	2.839.382.299	118.003.620	96,01%
2020	4.030.856.557	3.818.340.400	212.516.157	94,74%
2021	4.648.887.117	4.523.523.621	125.363.496	97,30%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan terdapat beberapa fenomena atau permasalahan yang terjadi yaitu jumlah anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, pada tahun 2019 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 2.957.385.919, pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 4.030.856.557 dan pada tahun 2021 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 4.648.887.117. Sisa anggaran pada setiap tahun termasuk besar karena mencapai ratusan juta rupiah. Sisa anggaran dan tingkat persentase penggunaan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuasi) yaitu sisa anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 118.003.620 dengan tingkat persentase 96,01%, sisa anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 212.516.157 dengan tingkat persentase 94,74%, dan sisa anggaran pada

tahun 2021 sebesar Rp 125.363.496 dengan tingkat persentase 97,30%. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini untuk tertarik diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis *Value for money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2021**”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian adalah bagaimanakah *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya yang ditinjau dari rasio ekonomi efisiensi dan rasio efektivitas tahun 2019-2021.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya yang ditinjau dari rasio efisiensi dan rasio efektivitas tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya .
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi kementrian dan kepada satuan kerja perangkat kota khususnya kinerja keuangan.

2. Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai kinerja keuangan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup dalam penelitian dibatasi dengan *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dengan rasio yang digunakan yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas tahun 2019-2021.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2018:6) mendefinisikan “Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor swasta. Keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2018:14) mendefinisikan “akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. Berbagai sistem akuntansi pemerintahan digunakan oleh berbagai entitas sektor publik. Sedangkan menurut Halim (2018:18) mendefinisikan “akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna

pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Menurut Mardiasmo (2018:148) Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mengacu pada proses pencatatan dan pengelolaan semua transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencakup pendapatan dan pengeluarannya. Berbagai sistem akuntansi pemerintah digunakan oleh berbagai entitas sektor publik.

2.1.1.2 Tujuan Sektor Publik

Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2018:130) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru.
2. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan

Standar akuntansi keuangan merupakan salah satu standar akuntansi.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. Sektor Publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Bastian (2018:297) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin kebenarannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Mardiasmo (2018;63) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan menjualkan (*trade offs*);
3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.1.2 *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018:128) *value for money* adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Menurut Mahmudi (2019:83), menyatakan bahwa *Value for money* merupakan metode yang penting dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*). Permasalahan yang sering dihadapi

oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2017:57), *value for money* adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Menurut Mahmudi (2019:98) *value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.

Value for money merupakan metode pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2015:83), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Ekonomi: konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar.
2. Efisiensi: efisien terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau istilah lain output per unit input.
3. Efektivitas: efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

Menurut Mardiasmo (2018:128) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Terdapat tiga indikator utama dalam *value for money*, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif.
2. Efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Menurut Mardiasmo (2018:127) indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi). Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

2.1.3 Kinerja

Hasibuan (2018:93) menyatakan bahwa “Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Pengukuran kinerja adalah merupakan suatu alat manajemen untuk bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”. Mengenai penilaian kinerja, menurut Simamora adalah proses yang mengukur karyawan,

penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari kinerja pelaksanaan pekerjaan”

Menurut Sedarmayanti (2017:2019) pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi organisasi. Menurut Mangkunegara (2018:67) istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menuurut Winardi (2018:136) menyatakan bahwa “seorang manejer yang bekerja ekstra lama dikantornya guna memenuhi kebutuhannya yang akan prestasi, mungkin merasa jam-jam kerja ekstra tersebut berbenturan dengan kebutuhaannya akan diafiliasi yang diekspresi dalam wujud keinginannya untuk berada ditengah-tengah keluarga”.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah.

2.1.4 Anggaran

Berdasarkan pendapat Richard dalam Suparmoko (2018:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang”. Sedangkan Menurut Prawironegoro (2018:2) “Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”.

Menurut Mardiasmo (2018:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Menurut Suparmoko (2018:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang”. Sedangkan

Menurut Anthony dan Govindarajan (2018:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi

dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

2.1.5 Kinerja Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Halim (2018: 24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Halim (2018;20) APBK adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRK) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP No. 58 Tahun 2005), tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya sebagai bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam rangka APBK.

Keuangan daerah menurut Mamesah (Halim, 2018:23) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

2.1.6 Rasio Ekonomi

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang

dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.

Menurut Mardiasmo (2018:4) ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi adalah seluruh sumber daya input diperoleh dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) yaitu harga yang mendekati pasar. Ukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan. Pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) sering disebut juga kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh sumber daya input tidak terjadi pemborosan. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat ekonomis
2	90% – 100%	Ekonomis
3	80% – 90%	Cukup Ekonomis
4	60% – 80%	Kurang Ekonomis
5	< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Mahmudi (2019:84)

2.1.7 Rasio Efisiensi

Menurut Bastian (2017:59) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maximum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2017:83) Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*.

Mardiasmo (2018:133) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan

Efisiensi di ukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* di banding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Menurut Halim (2018:234) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien. atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Relisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Output : Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.

Input : Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Kurang Efisien
3	80% – 90%	Cukup Efisien
4	60% – 80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2019:84)

2.1.8 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019: 86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Menurut Robbins (2017:8) Efektifitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran.

Efektifitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan. Pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Menurut Ahadi (2018:3). Efektifitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Suatu organisasi yang bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Menurut Siagian (2018:24) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Menurut Mardiasmo (2018:134) Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektifitas selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat

dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mahmudi (2019:85) meremuskan efektifitas sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	Cukup Efektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:85)

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Zenita (2022) dengan judul *Analisis Value for money* Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio ekonomis maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan ekonomis

karena memiliki persentase rasio dibawah 100%. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan jika selama 2 tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisiensi yaitu pada tahun 2018 dan 2019 dimana persentase rasio efektivitas pada tahun 2018. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 dikatakan efektif karena memiliki rasio efektivitas diatas 100% yang artinya pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mampu melaksanakan anggaran dengan pencapaian maksimal.

Rasyidi (2021) dengan judul *Analisis Value for money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomi selama tiga tahun menunjukkan kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi. 3Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektifitas selama tiga tahun terjadi fluktuasi.

Penelitian dari Munandar (2021) dengan judul *Analisis Value for money* Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah

bahwa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya masuk kategori tidak efisien. Hasil perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 masuk dalam kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%.

Rahman (2021) dengan judul *Analisis Value for money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada Rasio Ekonomis tahun 2017-2019 sudah baik, tetapi hasil dari Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitasnya belum dapat dikatakan sebagai kinerja yang efisien serta belum efektif.

Mahbengi (2017) dengan judul *Analisis Value for money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah*. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari kosep pengukuran *Value for money* kinerja pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah tahun 2011-2015 berdasarkan indikator rasio ekonomis tergolong katagori ekonomis rasionya berada diantara 90-100%, rasio efisisensi tergolong katagori kurang efisisen rasionya berada diantara 90-10%, dan rasio efektivitas tergolong katagori efektif rasionya berada diantara 90-100%. Faktor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya *value for money* adalah meningkatnya rasio ekonomis disebabkan karena meningkatnya belanja daerah yang di anggarkan dan yang terealisasi tapi perbandingan selisihnya tidak signifikan, meningkatnya rasio efisiensi disebabkan karena realisasi belanja dan realisasi pendapatan perbandingan selisihnya tidak signifikan, rasio efektivitas target belanja dan realisasi belanja mengalami peningkatan tetapi realiasi pendapatan tidak pernah mencapai bahkan melebihi target yang terealisasi. Dampak dari pengukuran dengan konsep *value for money* terhadap APBD pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah adalah terhadap penyusunan APBD tahun selanjut

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis <i>Value for money</i> Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Zenita, 2022)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio ekonomis maka dapat disimpulkan jika selama 3 (tiga) tahun terakhir dikatakan ekonomis karena memiliki persentase rasio dibawah 100%. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jika dilihat dari rasio efisiensi maka dapat disimpulkan jika selama 2 tahun berturut-turut yang dinilai tidak efisiensi yaitu pada tahun 2018 dan 2019 dimana persentase rasio efektivitas pada tahun 2018. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 dikatakan efektif karena memiliki rasio efektivitas diatas 100%.	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian
2	Analisis <i>Value for money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Rasyidi, 2021)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode <i>Value for money</i> dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomi selama tiga tahun menunjukkan kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan. Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode <i>Value for money</i> dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi. Berdasarkan metode <i>Value for money</i> dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektifitas selama tiga tahun terjadi fluktuasi.	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

Lanjutan Tabel 2.4

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Analisis <i>Value for money</i> Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019 (Munandar, 2021)	Penelitian kualitatif	Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%.	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian
4	Analisis <i>Value for money</i> Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Rahman, 2015)	Penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada Rasio Ekonomis tahun 2017-2019 sudah baik, tetapi hasil dari Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitasnya belum dapat dikatakan sebagai kinerja yang efisien serta belum efektif.	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

Lanjutan Tabel 2.4

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Analisis <i>Value for money</i> Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah (Mahbengi, 2017)	Penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari kosep pengukuran <i>Value for money</i> kinerja pemerintah daerah kabupaten Bener Meriah tahun 2011-2015 berdasarkan indikator rasio ekonomis tergolong katagori ekonomis rasionya berada diantara 90-100% rasio efisisensi tergolong katagori kurang efisisen rasionya berada diantara 90-10%, dan rasio efektivitas tergolong katagori efektif rasionya berada diantara 90-100%.	Menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi	Lokasi penelitian dan tahun atau periode penelitian

Sumber: Data diolah, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya periode 2019-2021. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya. Objek penelitian yang akan diteliti adalah laporan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya periode 2019-2021.

3.1.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Umar (2019:142) penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi untuk melihat, mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal

yang sedang dihadapi sekarang. Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi adalah *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya periode 2019-2021.

3.1.4 Horison Waktu

Menurut Sugiyono (2018:6) deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena pada lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.5 Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu

bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya .

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Menurut Sutopo (2018:56), "Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh". Menurut Sugiyono (2018:147) Data yang di pergunakan dalam penelitan ini adalah dengan cara Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instransi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu sebuah tulisan yang memuat informasi. Mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya seperti dokumen mengenai profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya , data laporan keuangan dan lainnya.

3.3 Definisi dan Operasional Variabel

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Ekonomi	Rasio ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan <i>input value</i> . Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan <i>input value</i> adalah realisasi anggaran. (Mahmudi, 2019:84)	$= \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Rasio
2	Efisiensi	Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Mahmudi (2019:84)	$\frac{\text{Relisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$	Rasio

Lanjutan Tabel 3.1

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
3	Efektivitas	Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. (Mahmudi, 2019:85)	$= \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:15) penelitian kualitatif adalah “suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh,

kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran” Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan *input value*. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat ekonomis
2	90% – 100%	Ekonomis
3	80% – 90%	Cukup Ekonomis
4	60% – 80%	Kurang Ekonomis
5	< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Mahmudi (2019:84)

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar rasio

tersebut maka semakin efisien suatu organisasi. Mahmudi (2019:84) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Relisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Output : Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.

Input : Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Kurang Efisien
3	80% – 90%	Cukup Efisien
4	60% – 80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2019:84)

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mahmudi (2019:85) merumuskan efektivitas sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	Cukup Efektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:85)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melauai Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie adalah menyusun perencanaan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perencanaan lingkungan, serta pelayanan dan pengolahan kebersihan. Termasuk mencegah, mengendalikan dan pemulihan pencemaran air, udara dan tanah serta mendukung terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan

2. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran, limbah B3 dan kerusakan lingkungan
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta pengkajian AMDAL, UKL, UPL
5. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan dan kebersihan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan dan kebersihan serta proses pengelolaannya
7. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, penataan dan pengawasan lingkungan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir
8. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan pelayanan kebersihan
9. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan pengelolaan sampah
10. Pembinaan dan pengendalian UPT
11. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sejalan dengan visi Bupati Pidie Jaya adalah : Terwujudnya Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Yang Bersih, Sehat Dan Lestari. Visi tersebut di atas dapat diartikan sebagai membangun Pidie Jaya yang berkelanjutan sebagai kota yang bebas dari pencemaran dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditetapkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati
3. Melaksanakan pengawasan penataan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
4. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan, aparatur yang profesional, sistem informasi & pelayanan di bidang lingkungan hidup
5. Meningkatkan kerjasama & kemitraan dgn berbagai pihak dlm perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis & holistik
6. Meningkatkan kepedulian, ketrampilan & kemandirian masyarakat dalam perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Rasio Ekonomi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya

bahwa rasio ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan *input value*. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah

realisasi anggaran. Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya digunakan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Perhitungan rasio ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Rasio ekonomi target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2019} = \frac{2.839.382.299}{2.957.385.919} \times 100 = 96,01\%$$

- b. Rasio ekonomi target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2020} = \frac{3.818.340.400}{4.030.856.557} \times 100 = 94,74\%$$

- c. Rasio ekonomi target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2021} = \frac{4.523.523.621}{4.648.887.117} \times 100 = 97,30\%$$

Dari perhitungan rumus rasio ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Rasio Ekonomi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya
dari Tahun 2019 s.d 2021

No	Tahun	Target anggaran belanja (Rp)	Realisasi anggaran belanja (RP)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4:3 x 100
2	2019	2.957.385.919	2.839.382.299	96,01%
3	2020	4.030.856.557	3.818.340.400	94,74%
4	2021	4.648.887.117	4.523.523.621	97,30%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 target anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 4.030.856.557 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 3.818.340.400 dengan tingkat persentasi 94,74% dan pada 2021 target anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 4.648.887.117 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 4.523.523.621 dengan tingkat persentasi 97,30%. Pada tahun 2019 target anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 2.957.385.919 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.839.382.299 dengan tingkat persentasi 96,01%.

4.2.2 Rasio Efisiensi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya

Belanja rutin yang digunakan dalam penelitian ini pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya yaitu program pelayanan administrasi perkantoran karena hal ini merupakan salah satu belanja rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya setiap tahunnya uang merupakan kebutuhan pegawai. Untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja program pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya digunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Perhitungan efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2019} = \frac{2.839.382.299}{286.382.000} \times 100 = 991,47\%$$

- b. Efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2020} = \frac{3.818.340.400}{84.575.000} \times 100 = 4514,74\%$$

- c. Efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2021} = \frac{4.523.523.621}{122.293.000} \times 100 = 3698,92\%$$

Dari perhitungan rumus efisiensi dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Rasio Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari
Tahun 2019 s.d 2021

No	Tahun	Realisasi anggaran pendapatan (Rp)	Realisasi anggaran belanja (RP)	Persentase
1	2	3	4	5 = 4:3 x 100
2	2019	286.382.000	2.839.382.299	991,47%
3	2020	84.575.000	3.818.340.400	4514,74%
4	2021	122.293.000	4.523.523.621	3698,92%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada 2021 realisasi anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 122.293.000 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 4.523.523.621 dengan tingkat persentasi 3698,92%. Pada tahun 2020 realisasi anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 84.575.000 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 3.818.340.400 dengan tingkat persentasi 4514,74%. Pada tahun 2019 realisasi anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 286.382.000 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.839.382.299 dengan tingkat persentasi 991,47%.

4.2.3 Rasio Efektivitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya

Untuk mengetahui efektifitas anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya digunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019

$$\text{Rasio Efektivitas tahun 2019} = \frac{286.382.000}{290.000.000} \times 100 = 98,75\%$$

- b. Efektifitas anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020

$$\text{Rasio Efektivitas tahun 2020} = \frac{84.575.000}{315.000.000} \times 100 = 26,85\%$$

- c. Efektifitas anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021

$$\text{Rasio Efektivitas tahun 2021} = \frac{122.293.000}{220.000.000} \times 100 = 55,59\%$$

Dari perhitungan rumus efektifitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Hasil Rasio Efektifitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya
dari Tahun 2019 s.d 2021

No	Tahun	Target Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Sisa Anggaran Pendapatan	Persentase (%)
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = (4:3) x 100
2	2019	290.000.000	286.382.000	3.618.000	98,75%
3	2020	315.000.000	84.575.000	230.425.000	26,85%
4	2021	220.000.000	122.293.000	97.707.000	55,59%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa. pada tahun 2019 target anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 290.000.000 dan realisasi dari anggaran tersebut sebanyak Rp 286.382.000 dengan tingkat persentase 98,75% dari target anggaran pendapatan, pada tahun 2020 target anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebanyak Rp 315.000.000 dan realisasi anggaran pendapatan sebanyak Rp 84.575.000 dengan tingkat persentase 26,85% dari target anggaran pendapatan dan tahun 2021 target anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya 220.000.000 dan realisasi anggaran pendapatan sebanyak Rp 122.293.000 dengan tingkat persentase sebanyak 55,59% dari target anggaran pendapatan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis dan Pembahasan Rasio Ekonomi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya

Target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Target anggaran belanja dan Realisasi Anggaran belanja Anggaran
Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019
s.d 2021

No	Tahun	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Persentase	Kemampuan Keuangan
1	2	3	4	$5 = 4:3 \times 100$	5
2	2019	2.957.385.919	2.839.382.299	96,01%	Ekonomis
3	2020	4.030.856.557	3.818.340.400	94,74%	Ekonomis
4	2021	4.648.887.117	4.523.523.621	97,30%	Ekonomis

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat penerimaan dan pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 target anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 2.957.385.919 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.839.382.299 dengan tingkat persentasi 96,01%. Artinya kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan ekonomis karena tingkat persentase antara 90% sampai dengan 100%.
2. Pada tahun 2020 target anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 4.030.856.557 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 3.818.340.400 dengan tingkat persentasi 94,74%. Artinya kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan ekonomis karena tingkat persentase antara 90% sampai dengan 100%. Penerimaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan beberapa faktor seperti adanya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah, kemudian adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dalam meningkatkan jumlah retribusi dan adanya kebutuhan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya yang harus anggarankan.
3. Pada 2021 target anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 4.648.887.117 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 4.523.523.621 dengan tingkat persentasi 97,30%. Artinya kemampuan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan ekonomis karena tingkat persentase antara 90% sampai dengan 100%. Penerimaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah, kemudian kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dalam meningkatkan jumlah retribusi dan kebutuhan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya lebih kecil dari tahun sebelumnya.

4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya

Efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Dari Tahun 2019 s.d 2021

No	Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Persentase	Kemampuan Keuangan
1	2	3	4	$5 = 4 : 3 \times 100$	6
2	2019	286.382.000	2.839.382.299	991,47%	Tidak efisien
3	2020	84.575.000	3.818.340.400	4514,74%	Tidak efisien
4	2021	122.293.000	4.523.523.621	3698,92%	Tidak efisien

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat penerimaan dan pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 realisasi anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 286.382.000 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.839.382.299 dengan tingkat persentasi 991,47%. Artinya kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efesien karena tingkat persentase di atas 100%
2. Pada tahun 2020 realisasi anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 84.575.000 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 3.818.340.400 dengan tingkat persentasi 4514,74%. Artinya kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efesien karena tingkat persentase di atas 100%
3. Pada 2021 realisasi anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 122.293.000 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 4.523.523.621 dengan tingkat persentasi 3698,92%. Artinya kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efesien karena tingkat persentase di atas 100%

Ketidakefisienan pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya disebabkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan

harga pada saat penyusunan anggaran. Penyebab lainnya ketidak efisienan pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya diakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan atau belanja serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pengelolaan keuangan tidak efisien.

4.3.3 Analisis dan Pembahasan Rasio Efektifitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya

Perkembangan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 meningkat sebesar 14,86% dan pada tahun 2021 jumlah pendapatan sebesar 11,26%. Kemudian perkembangan realisasi anggaran pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 meningkat sebesar 17,53% dan tahun 2021 realisasi anggaran pendapatan menurun sebesar 25,43%. Efektifitas anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 s.d 2021

No	Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase	Kemampuan Keuangan
1	2	3	4	5 = 2-3	6= (3:2) x 100	7
2	2019	290.000.000	286.382.000	3.618.000	98,75%	Efektif
3	2020	315.000.000	84.575.000	230.425.000	26,85%	Tidak Efektif
4	2021	220.000.000	122.293.000	97.707.000	55,59%	Tidak Efektif

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2019 realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 286.382.000 dari anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 290.000.000 dengan tingkat persentase 98,75%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 3.618.000 yang tidak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya. Dapat disimpulkan realisasi anggaran pendapatan tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dapat dikatakan efektif.
2. Pada tahun 2020 realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 84.575.000 dari total anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 315.000.000 dengan tingkat persentase 26,85%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 230.425.000 yang tidak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya. Dapat disimpulkan realisasi anggaran pendapatan tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dapat dikatakan tidak efektif.
3. Pada tahun 2021 realisasi anggaran pendapatan pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 122.293.000 dari total anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 220.000.000 dengan tingkat persentase 55,59%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 97.707.000 yang tidak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya. Dapat disimpulkan realisasi anggaran pendapatan tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dapat dikatakan tidak efektif.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dapat dilakukan dengan cara tetap memperhatikan faktor-faktor keefisienan dan keefektifan serta keekonomisan dalam penggunaan anggaran. Selain itu juga, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengarahan sesuai dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada publik. Peningkatan Pendapatan Asli Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya diharapkan mampu memberikan masukan yang positif bagi perkembangan pembangunan di Pidie Jaya yang pada akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kabupaten Pidie Jaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dan Anggaran Pidie Jaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kinerja anggaran dengan menggunakan metode *value for money* dapat disingkat sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan rasio ekonomi bahwa realisasi target anggaran belanja dan belanja target anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2021 dapat dikatakan ekonomis.
 - b. Berdasarkan rasio efisiensi bahwa realisasi pengeluaran dan realisasi anggaran pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2021 dapat dikatakan tidak efisien.
 - c. Berdasarkan rasio efektivitas bahwa realisasi anggaran pendapatan belanja dan anggaran pendapatan belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 dapat dikelola dengan efektif. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada dapat dikatakan tidak efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dapat meningkatkan atau mempertahankan rasio ekonomi dengan melakukan realisasi pengeluaran

yang sesuai dengan kebutuhan kantor atau jumlah pengeluaran harus sesuai dengan penerimaan anggaran.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya harus dapat mengelola keuangan dengan efisien seperti menggunakan anggaran yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dan dapat dikelola dengan tepat waktu.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya dapat mengelolan realisasi anggaran pendapatan belanja dengan efektif seperti mengelola anggaran yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan. Kemudian pimpinan dapat memberikan tugas kepada aparatur yang sesuai dengan bidangnya sehingga aparatur dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ayuningtyas, Hertianti. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Halim, Abdul (2018). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis Kritis atas Lapoan Keuangan*. Jakarta : Raja Grasindo Persada
- Hasibuan, Malayu S.P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta*
- Husnawati, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (1), 442-456
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mahbengi, Syahri. (2017). Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1 (1), 1-13
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. STIM YPKN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara AA. Anwar Prabu. (2018). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: rafika ADITAMA
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Munandar, Agus. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5 (3), 1-14
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan *Laporan Keuangan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Tidak Langsung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Langsung

- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan*.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Daerah
- Prawironegoro, Darsono. (2018). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahman, Winia. (2021). Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (1), 1-17.
- Rasyidi, Ali. (2021). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya*, 1 (1), 1-12.
- Robbins SP, dan Judge. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14 (2), 13-29.
- Rudianto. (2017). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2018). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Kedua*. Yogyakarta.
- Susilo, Y Sri (2018) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutopo, A. H. (2018). *Terampil Mengolah Data. Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada.

Undang-Undang No.11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintah Aceh.*

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang *Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Wibowo. (2018). *Manajemen Perubahan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winardi, J. (2018). *Manajemen Perubahan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zenita, Raisya. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, 1 (1), 1-10